



FORPI AWASI PENYALURAN BANSOS DAMPAK COVID-19 **Coret, Penerima Dobel Dalam Satu Keluarga**

YOGYA (KR) - Mengawali ketugasannya di awal tahun usai diukuhkan, Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Kota Yogya melakukan pengawasan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19. Sesuai kebijakan sebelumnya, penerima dobel yang masih dalam satu keluarga maka salah satunya harus dicoret dari daftar.

Anggota Forpi Kota Yogya Baharudin, menjelaskan pada tahun ini penerima bansos terutama untuk program sembako di Kota Yoga mengalami penurunan sekitar 2.400 penerima dibanding tahun sebelumnya. "Banyak faktor, salah satunya ada penerima ganda dalam satu keluarga. Semoga dengan penyisiran data yang cukup ketat, tahun ini tidak ada yang dobel lagi," jelasnya, Senin (1/2).

Bansos yang dikucurkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi bagi warga yang terkena imbas Covid-19 diakuinya cukup banyak. Antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) serta bantuan sembako perluasan. Setiap keluarga yang masuk dalam daftar penerima bansos, hanya bisa mendapatkan satu jenis bantuan.

Baharudin menambahkan, berdasarkan data yang ia peroleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya, jumlah penerima bantuan sembako tercatat sebanyak 18.241 keluarga. Terdiri dari 10.772 keluarga penerima bantuan sembako reguler dan 7.699 keluarga terdampak pandemi Covid-19. "Kami membuka posko pengaduan jika ada warga yang menemukan masalah. Baik

tidak tepat sasaran, penyelewengan maupun pungutan liar. Silakan laporkan ke Sekretariat Forpi Kota Yogya di kompleks Balaikota," imbuhnya.

Di samping itu, dirinya mendorong sinkronisasi data terus dilakukan. Terutama menggabungkan data penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dari sinkronisasi data tersebut akan terlihat keluarga pra sejahtera yang seharusnya memperoleh intervensi kebijakan. Apalagi Kota Yogya juga memiliki program Keluarga Sasaran Perlindungan Jaminan Sosial (KSJPS) yang selalu di-update tiap tahun. Sehingga hasil pendataan KSJPS harus selalu disandingkan dengan Basis Data Terpadu (BDT) milik Kementerian Sosial.

(Dhi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005